

# KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH PASCA AJUDIKASI ( STUDI DI DESA GENENGAN, KECAMATAN PAKISAJI , KABUPATEN MALANG )

 Oleh: PANDU NUSWANTARA ( 04400039 )

Law

Dibuat: 2008-11-18 , dengan 3 file(s).

**Keywords:** Kesadaran Hukum, Peralihan Hak Atas Tanah.

Untuk menghindari benturan didalam masyarakat yang disebabkan oleh masalah kepemilikan tanah, pemerintah membuat suatu kebijaksanaan yang mengatur mengenai kepemilikan tanah dan melaksanakan pendaftaran tanah baik sistematis maupun sporadik yang meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis pada obyek pendaftaran tanah yang telah didaftar yang terjadi karena peralihan hak melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, dll. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai: 1) Bagaimana kesadaran hukum masyarakat desa Genengan terhadap kewajiban pendaftaran peralihan hak atas tanah pasca ajudikasi? 2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat desa Genengan terhadap kewajiban pendaftaran peralihan hak atas tanah pasca ajudikasi ?. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis artinya dalam melakukan penelitian melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah dikaitkan dengan keterikatan dan perkembangan dalam masyarakat. Di dalam pasal 36 ayat ( 2 ) PP No 24 Tahun 1997 disebutkan tentang adanya kewajiban pemegang hak untuk mendaftarkan tanahnya apabila terjadi peralihan hak atas tanah. Namun yang terjadi di dalam masyarakat khususnya di desa Genengan, tidak semua peralihan hak atas tanah didaftarkan karena disebabkan berbagai hal, antara lain responden merasa bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah memberatkan mereka, responden belum banyak yang mengetahui tentang prosedur pendaftaran peralihan hak atas tanah maupun pendaftaran tanah sporadik karena menyebarnya peraturan tentang pendaftaran tanah dan belum mendapat sosialisasi sebelumnya dari instansi terkait.

Kontribusi pemikiran yang dapat penulis ajukan dalam karya ilmiah ini antara lain : Sebaiknya pemerintah mengkaji kembali UU Pendaftaran tanah berkaitan dengan biaya, disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat desa. Diharapkan pemerintah menyederhanakan segala hal yang berhubungan dengan biaya pendaftaran tanah maupun prosedur pendaftaran tanah disederhanakan dalam satu undang-undang saja, agar tidak membingungkan masyarakat.

To avoid collision in society caused by land proprietary concern, the government make a policy to manage land proprietary and conducting land registration, both systematically and sporadically, includes land registration at the first time and land registration data maintenance. Land registration data maintenance is done if it is occurred physical or juridical data changes on

land registration object, which has been registered, because of rights transfer through trade, grant, barter and so on. In this thesis, writer adapts problems about 1) how is law awareness of Genengan society on the obligation to register rights transfer of land post-adjudication? 2) What factors are affecting law awareness of Genengan society on the obligation to register rights transfer of land post-adjudication? Here writer uses sociological-juridical approach, which means that conducting research by looking at law as human behavior in society, that is government regulation number 24 year 1997 managing about the establishment of land registration in regard to the committed to and development in society.

In section 36 sub-section (2) government regulation number 24 year 1997 mentioned about the existence of rights holding obligation to register his/her land if it is occurred right transfer of land. But, what happen in the society, especially Genengan society, not all right transfer of land is registered because of some reasons. For instance, respondents perceive that cost to register rights transfer of land is weighed against them. Respondents do not know much about its procedure yet, because there is no information about land registration and previously do not get socialization from the concerned instance.

Writer can give some thought contribution in this thesis, such as: government should review Land Registration Law related to the cost, adjusted to society economy condition, especially villager. It is expected that government simplify all the things related to both land registration costs and its procedures in one law, in order to not puzzling the society.